

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era global telah menciptakan tingkat persaingan antar calon tenaga kerja yang semakin ketat dan kompetitif. Melalui kesepakatan global ini, tenaga kerja dan hasil-hasil produksi dari suatu negara dapat dengan leluasa masuk ke negara lain tanpa adanya pembatasan. Bila peningkatan kualitas tenaga kerja tidak dilakukan, maka tidak menutup kemungkinan suatu bangsa akan menjadi buruh di negeri sendiri. Oleh karena itu meningkatkan kualitas pendidikan sehingga menghasilkan lulusan yang terampil, professional, serta memiliki daya saing yang tinggi sudah menjadi keniscayaan.

Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang melesat begitu pesat, terutama dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, juga menuntut kita untuk merespon secara tepat. Akselerasi pembangunan Bangsa Indonesia akan semakin jauh tertinggal manakala proses pendidikan tidak didukung dan diiringi oleh IPTEK yang relevan. Begitupula dengan pembangunan pendidikan mesti didukung oleh sarana dan perangkat yang memadai dan dilaksanakan dengan metodologi dan sistem yang inovatif. Untuk mewujudkan lulusan / tenaga kerja yang bermutu, terampil, inovatif, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki daya saing dan daya serap ke dunia kerja, pemerintah mengembangkan kebijakan *link and match*.

Kebijakan ini diharapkan akan menjembatani kesenjangan antara harapan dunia usaha terkait dengan kompetensi calon tenaga kerja dengan institusi (sekolah) yang mendidik dan melatih tenaga kerja. Pendidikan bagi calon tenaga kerja yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan institusi pasangan merupakan kunci agar bangsa kita mampu bersaing dalam kancah internasional.

Pendidikan yang berorientasi pada pembentukan tenaga kerja praktis (*vocational education*) dilaksanakan pada berbagai jalur dan jenjang. Jalur pendidikan kejuruan meliputi pendidikan formal dan pendidikan nonformal. Jenjang pendidikan vokasional tingkat menengah pada jalur formal yaitu sekolah menengah kejuruan, dilanjutkan pada jenjang pendidikan vokasional di perguruan tinggi meliputi pendidikan vokasi yang diselenggarakan di akademi dan politeknik, pendidikan profesi yang diselenggarakan setelah menyelesaikan jenjang pendidikan sarjana (S1) dan pendidikan spesialis yang diselenggarakan setelah menyelesaikan pendidikan akademik pascasarjana (S2).

Selain melalui pendidikan formal pendidikan vokasional juga dapat ditempuh melalui jalur nonformal yang dilaksanakan melalui lembaga-lembaga kursus dan pelatihan-pelatihan ketrampilan. Pendidikan vokasional pada jalur nonformal juga dilaksanakan secara berjenjang mulai dari pendidikan ketrampilan yang bersifat teknis, teknis lanjutan sampai dengan pendidikan ketrampilan manajerial.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang

sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs (UU Nomor 20 tahun 2003). Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah menyiapkan peserta didik memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional.

Pendidikan menengah kejuruan berfungsi: (a) meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur; (b) meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air; (c) membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (d) meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni; (e) menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan (f) meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk hidup mandiri di masyarakat dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi. Melalui pendidikan kejuruan ini, peserta didik diharapkan memiliki bekal umum untuk menghadapi kehidupan dan secara khusus memiliki kemampuan dan keterampilan untuk bekerja sesuai dengan bidang keahliannya. Selain disiapkan untuk mengisi formasi pekerjaan di bidang pekerjaan tertentu, lulusan SMK diharapkan dapat mengikuti pendidikan lanjutan ke jenjang yang lebih tinggi dengan baik.

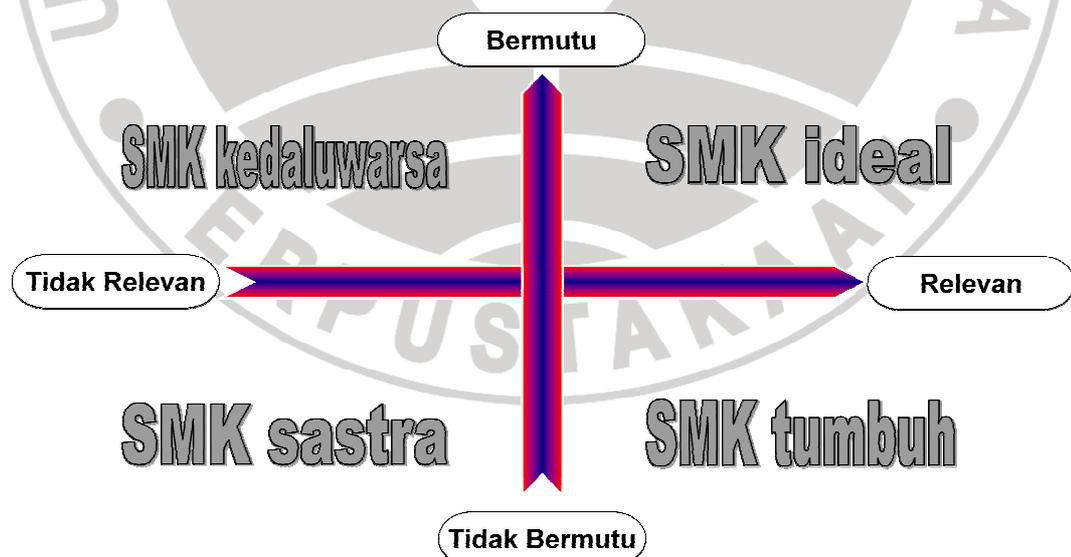
Upaya-upaya untuk merevitalisasi SMK terus dilakukan, namun sampai saat ini konsentrasi pemerintah masih terfokus pada kuantitas. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya berbagai permasalahan yang muncul dalam sistem pendidikan

kita. Diantaranya adalah: *pertama*, masih rendahnya kualitas atau mutu pendidikan. *Kedua*, adalah belum adanya pemerataan dalam memperoleh akses di bidang pendidikan. *Ketiga*, tidak adanya efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan. Disamping itu persoalan yang *keempat* adalah belum adanya demokratisasi pendidikan. Peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan masih sangat terbatas (Nurharjadm, 2008:1). Khusus untuk sekolah kejuruan, persoalan yang dirasakan sangat penting berkaitan dengan ketidakmampuan lulusan dalam memasuki lapangan kerja. Hal itu disebabkan karena adanya ketidaksesuaian antara "supply" lulusan dengan kecilnya "demand". Selain itu juga kualitas dan relevansi lulusan yang memang jauh dari kehendak pasar.

Salah satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk mengantisipasi hal itu adalah kebijakan Pendidikan Sistem Ganda (*dual sistem*). Pendidikan Sistem Ganda (PSG) yang diselenggarakan pada sekolah menengah kejuruan merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan "link and match" antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Bentuk penyelenggaraan PSG menekankan pada pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di sekolah dengan program keahlian yang diperoleh langsung di perusahaan. Sistem ini berusaha mengintegrasikan kepentingan dunia pendidikan dengan dunia industri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan relevansi lulusan pendidikan, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), baik pengetahuan, ketrampilan maupun etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja, sehingga siap masuk ke pasaran kerja.

Melalui pendidikan sistem ganda ini diharapkan ada kesesuaian antara mutu dan relevansi yang dimiliki lulusan, dengan tuntutan dunia kerja.

Kebijakan *link and match* untuk meningkatkan kompetensi lulusan dan kesesuaiannya dengan kebutuhan dunia nyata memaksa sekolah untuk menyelenggarakan proses pendidikan dengan selalu melibatkan dunia usaha/industri. Pola penyelenggaraan pendidikan secara sepihak oleh sekolah saja (*school center*) sudah nyata membuat kompetensi lulusan SMK tidak relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja. Penyelenggaraan diklat pada SMK dilandasi oleh prinsip "keterkaitan dan kesepadanan" yang berorientasi kepada peningkatan mutu dan relevansi. Mutu mengacu pada peningkatan kualitas kompetensi yang mampu didemonstrasikan oleh peserta didik setelah mengikuti proses pendidikan dan pelatihan, sedangkan relevan berarti adanya kesesuaian antara kompetensi yang diajarkan oleh SMK dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri.



Gambar 1.1
Korelasi antara mutu dan relevansi pendidikan dengan sebutan SMK
(Sumber : <http://download.smkdki.net/>)

Dalam rangka menghasilkan lulusan yang relevan, maka keterlibatan sektor industri dalam proses pendidikan merupakan keniscayaan. Oleh karena itu tidak bisa ditangani hanya oleh SMK, tetapi harus melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan dunia kerja, khususnya dunia usaha dan industri, termasuk organisasi-organisasi yang ada di dunia usaha dan asosiasi keahlian. Untuk mencapai keterkaitan dan kesesuaian antara SMK dengan institusi pasangan, maka diselenggarakan pendidikan sistem ganda (PSG). PSG bukanlah kegiatan yang terlepas (mandiri) dari proses pendidikan secara keseluruhan, tetapi merupakan bagian integral dari proses pendidikan di SMK secara keseluruhan mulai dari proses penerimaan peserta didik baru hingga pemasaran lulusan. Oleh karena itu, setiap kegiatan sekolah selalu terintegrasi didalamnya program pendidikan sistem ganda. Untuk dapat melaksanakan pendidikan sistem ganda, setidaknya terdapat tiga lembaga yang harus ada, yaitu sekolah, institusi pasangan selaku institusi pasangan dan majelis sekolah selaku mediator antara keduanya. Antara ketiga lembaga ini harus terjalin kerjasama yang erat agar pelaksanaan pendidikan sistem ganda, agar proses pendidikan di SMK dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Oleh karena itu pihak dunia usaha/industri harus terlibat mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendidikan. Hal ini juga disarankan oleh Domu (2008:590) bahwa "*Link and Match* bukan hanya dalam kegiatan praktek siswa, tetapi juga dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi materi pelajaran terkait." Keterlibatan pihak dunia usaha/industri ini tidak hanya pada kegiatan praktek kerja industri saja tetapi seluruh kegiatan pendidikan, seperti penerimaan peserta didik baru, penyusunan kurikulum,

penyelenggaraan pembelajaran di sekolah, penyelenggaraan praktek kerja industri (prakerin), ujian kompetensi sampai dengan pemasaran alumni ke dunia kerja. Dengan konsep pendidikan sistem ganda ini diharapkan, lulusan sekolah menengah kejuruan dapat terserap dengan secara maksimal ke dunia kerja, karena dari segi kompetensi lulusannya sudah diakui oleh dunia kerja begitu pula dengan relevansinya terhadap dunia kerja.

Harapan pemerintah terhadap lulusan sekolah kejuruan ternyata belum memenuhi harapan yang diinginkan. Karena dalam kenyataan yang terjadi masih jauh dari harapan, yaitu masih rendahnya jumlah lulusan SMK yang terserap dunia kerja. Dalam laporan BPS sebagaimana disampaikan Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Arizal Ahnaf (Tribun Jabar, 6 Januari 2009) menyatakan :

“Angka pengangguran pada Agustus 2008 berdasarkan pendidikan didominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Data Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan, lulusan SMK tertinggi yakni 17,26 persen, disusul tamatan SMA (Sekolah Menengah Atas) 14,31 persen, lulusan universitas 12,59 persen, serta Diploma I/II/III 11,21 persen. Tamatan SD ke bawah justru paling sedikit menganggur yakni 4,57 persen dan SMP 9,39 persen.”

Lulusan sekolah menengah kejuruan yang diproyeksikan sejak awal untuk menjadi lulusan yang siap kerja dalam kenyataannya menduduki peringkat pertama dalam menyumbangkan pengangguran. Padahal persentase lulusan SMA jauh lebih banyak daripada lulusan SMK. Dengan memperhatikan persentase pengangguran berdasarkan jenis pendidikan diatas, kita dapat menyimpulkan bahwasanya lulusan SMK belum menjadi pilihan bagi dunia kerja dalam perekrutan tenaga kerja.

Sekaitan dengan keterserapan SMK di dunia kerja, menurut (Samsudi, 2008:1) dalam pidato Dies Natalis ke-43 Unnes mengatakan,

“...idealnya secara nasional lulusan SMK yang bisa langsung memasuki dunia kerja sekitar 80-85%, sedang selama ini yang terserap baru 61%. Pada tahun 2006 lulusan SMK di Indonesia mencapai 628.285 orang, sedangkan proyeksi penyerapan atau kebutuhan tenaga kerja lulusan SMK tahun 2007 hanya 385.986 atau sekitar 61,43%”.

Data yang dikemukakan di atas semakin memperjelas bagi kita tentang peran serta SMK dalam menyumbangkan pengangguran setiap tahunnya kepada bangsa Indonesia, yaitu sekitar 39 persen dari lulusan SMK setiap tahunnya.

Dalam perkembangan berikutnya, Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan, Joko Sutrisno Selasa (26/1/2010) di Jakarta menyampaikan "Kalau tahun ini daya serap lulusan ke pasar kerja baru 50 persen, maka tiap tahun diharapkan ada kenaikan 5 persen sehingga pada 2014 lulusan SMK bisa terserap 70 persen ke dunia kerja" (http://www.pendidikan-diy.go.id/?view=baca_berita&id_sub=1482).

Sajian data terkait rendahnya daya serap lulusan SMK oleh lapangan kerja ini menunjukkan bahwa lulusan SMK masih belum menjadi primadona bagi dunia kerja. Dengan dasar itulah penulis menaruh minat untuk melakukan penelitian tentang Evaluasi Pendidikan Sistem Ganda (Studi Kasus di SMK Negeri 1 Metro).

B. Fokus Penelitian

Pendidikan sistem ganda merupakan pendidikan yang dilaksanakan secara sinkron dan sistematis antara SMK dengan institusi pasangan terhadap peserta didik yang diarahkan untuk mencetak peserta didik agar kompeten dalam bidang tertentu. Konsep pendidikan ini merupakan perubahan dari konsep pendidikan kejuruan sebelumnya yang dilaksanakan oleh sekolah saja, sementara institusi

pasangan/perusahaan mitra hanya bertindak sebagai instansi yang berperan hanya sebagai tempat praktik.

Dengan perubahan sistem ini, diharapkan dapat meningkatkan peran institusi pasangan dari peran sebagai objek menjadi subjek serta menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Namun apakah proses pendidikan sistem ganda sudah sesuai dengan yang telah digariskan secara konseptual oleh pemerintah? Penelitian berusaha mengevaluasi pendidikan sistem ganda dengan berfokus pada keterlibatan / peran institusi pasangan dalam proses pendidikan sistem ganda di SMK.

C. Rumusan Masalah

Tujuan utama pendidikan kejuruan adalah mendidik siswa sehingga mampu untuk siap bekerja pada bidang tertentu dengan adaptasi yang minimal. Indikator keberhasilan sekolah menengah kejuruan adalah sejauhmana lulusan SMK mampu diserap oleh dunia kerja. Untuk menciptakan keselarasan (relevansi) yang maksimal, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional telah menetapkan sebuah kebijaksanaan kesetaraan dan kesepadanan atau *link and match*. Untuk melaksanakan kebijaksanaan tersebut pada tataran implementasinya dilaksanakan dengan pendidikan sistem ganda (PSG). PSG adalah suatu bentuk pengelolaan pendidikan yang diselenggarakan secara bersama-sama antara SMK dengan institusi pasangan (perusahaan, institusi, industri) mulai dari proses penerimaan peserta didik baru sampai dengan pemasaran alumni. Dengan model ini diharapkan akan dapat menjembatani kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja yang diinginkan oleh institusi

pasangan dengan kualitas lulusan yang di hasilkan oleh SMK. Dengan asumsi ini diharapkan lulusan SMK dapat diterima oleh institusi pasangan sehingga dapat menurunkan angka pengangguran.

Pada kenyataannya, sampai dengan tahun 2010 keterserapan lulusan SMK masih sangat minim. Berdasarkan data yang dilaporkan Direktur Pembinaan SMK, jumlah lulusan SMK baru 50% setiap tahunnya. Dengan kondisi tersebut penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan PSG dalam aspek pengelolaan, implementasi PSG dalam penerimaan peserta didik baru, implementasi PSG dalam penyusunan kurikulum, implementasi PSG dalam proses pembelajaran di sekolah, implementasi PSG dalam praktek kerja industri, implementasi PSG dalam kunjungan industri, implementasi PSG dalam kegiatan ujian kompetensi dan implementasi PSG dalam pemasaran alumni.
2. Apakah ada kesesuaian antara pelaksanaan PSG dengan standar pelaksanaan PSG yang ditentukan oleh sekolah ?
3. Apasajakah yang menjadi faktor-faktor pendukung dan penghambat keterlibatan peran institusi pasangan dalam implementasi pendidikan sistem ganda?

D. Batasan Masalah

Pendidikan sistem ganda memiliki banyak dimensi dalam pelaksanaannya, seperti manajemen pendidikan sistem ganda, pembiayaan pendidikan sistem ganda, standar pelaksanaan pendidikan sistem ganda, dan lain sebagainya.

Mengingat keterbatasan waktu dan kemampuan peneliti dalam penelitian ini serta agar penelitian ini lebih fokus, maka dalam kegiatan penelitian dibatasi pada keterlibatan institusi pasangan / industri dalam pendidikan sistem ganda. Dari aspek tempat dan waktu penelitian, kegiatan penelitian terbatas pada kegiatan PSG yang berlangsung di SMK Negeri 1 Metro tahun pembelajaran 2010/2011.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran, maka perlu dijelaskan beberapa istilah penting yang berkaitan dengan topik dan judul penelitian:

1. Evaluasi

Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan dengan evaluasi adalah upaya yang dilakukan untuk mencari informasi dan mengetahui tentang adanya kesesuaian / ketidaksesuaian konsep pendidikan sistem ganda dan standar sekolah dalam pelaksanaan pendidikan sistem ganda terhadap implementasinya dan untuk mengetahui secara menyeluruh tentang pelaksanaan kegiatan tersebut.

2. Pendidikan Sistem Ganda

Pendidikan Sistem Ganda adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian professional yang memadukan secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan langsung di dunia kerja, terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian professional tertentu.

3. Institusi Pasangan

Institusi pasangan adalah perusahaan, industri, instansi baik milik pemerintah maupun swasta dalam skala kecil, menengah atau besar yang menjadi

mitra sekolah menengah kejuruan dalam menyelenggarakan pendidikan sistem ganda. Dalam beberapa literatur istilah institusi pasangan lazim pula disebut DUDI yang merupakan singkatan dari Dunia Usaha dan Dunia Industri yang menjadi mitra SMK dalam PSG.

4. Praktek Kerja Industri (Prakerin)

Praktik kerja industri adalah kegiatan pembelajaran praktikum siswa yang diselenggarakan secara langsung di institusi pasangan.

5. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Sekolah menengah kejuruan adalah lembaga pendidikan formal milik pemerintah atau swasta yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada bidang keahlian tertentu.

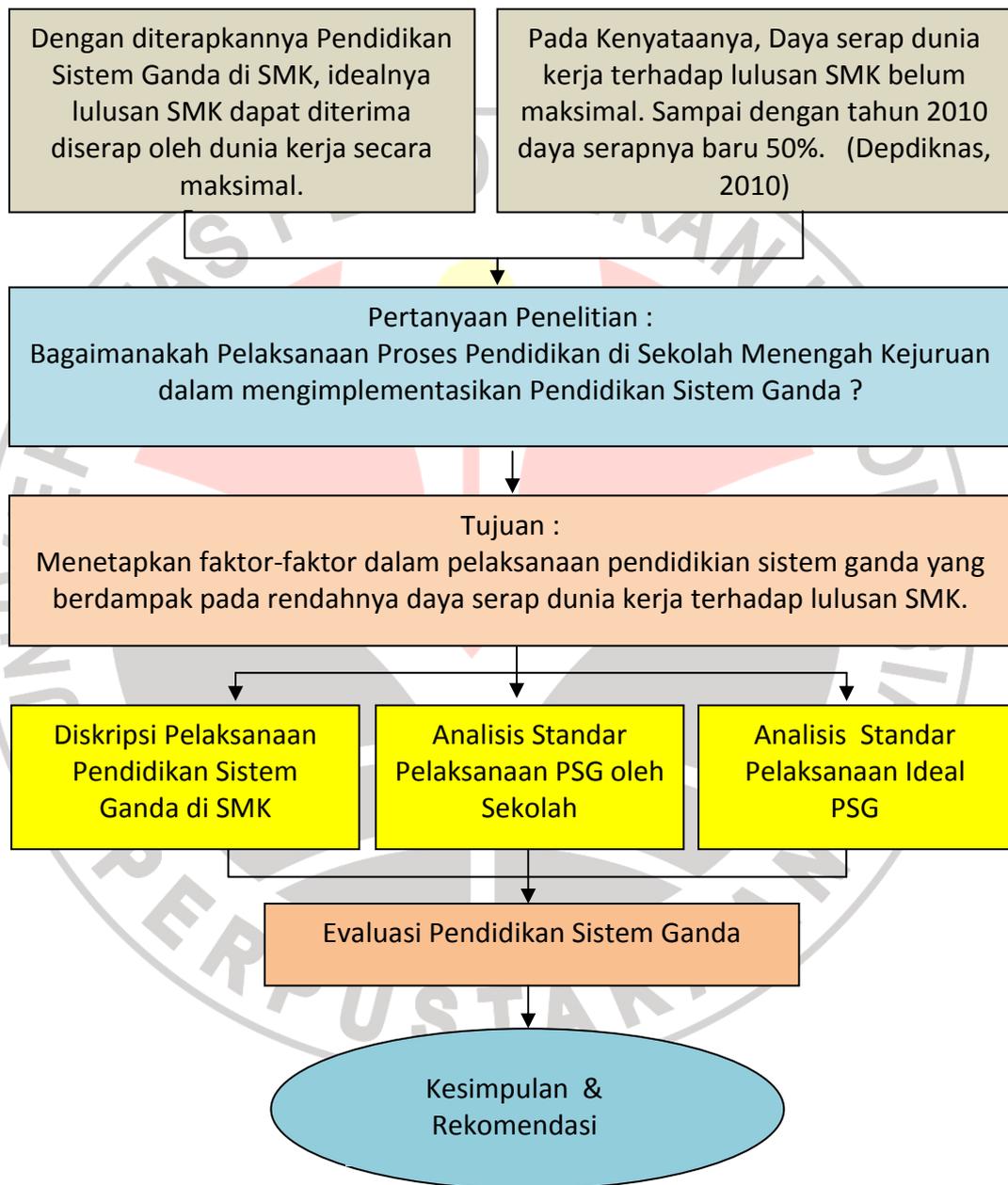
6. Majelis Sekolah

Organisasi yang dibentuk secara bersama-sama antara sekolah dengan institusi pasangan untuk melaksanakan koordinasi / mediasi antara sekolah dengan institusi pasangan dalam pelaksanaan pendidikan sistem ganda.

F. Kerangka Berfikir

Penelitian ini berusaha untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan pendidikan sistem ganda. Evaluasi yang dilakukan meliputi komponen proses penyusunan, pelaksanaan program dan penilaian program pendidikan sistem ganda. Kegiatan evaluasi ini berusaha untuk mengetahui apakah yang menjadi standar sekolah dalam kegiatan pendidikan sistem ganda yang diselenggarakannya, implementasi pendidikan sistem ganda yang selama ini

dilaksanakannya, serta melakukan evaluasi pelaksanaan pendidikan sistem ganda berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh sekolah dan kriteria baku dalam pendidikan sistem ganda.



Gambar 1.2 : Kerangka Berfikir Penelitian

G. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan memperoleh data tentang proses-proses pendidikan yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan pendidikan sistem ganda di SMK Negeri 1 Metro ditinjau dari aspek keterlibatan peran institusi pasangan. Berdasarkan hasil temuan dan evaluasi, selain digunakan untuk perbaikan ke dalam, diharapkan juga dapat dijadikan bahan perbaikan pelaksanaan pendidikan sistem ganda pada sekolah-sekolah lainnya yang dipandang memiliki transferabilitas yang layak.

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

1. Memperoleh data tentang proses-proses pendidikan yang harus diperbaiki tentang keterlibatan peran institusi pasangan dalam pengelolaan pendidikan sistem ganda, penerimaan peserta didik baru, penyusunan kurikulum, proses pembelajaran di sekolah, praktek kerja industri, kunjungan industri, ujian kompetensi, dan dalam pemasaran alumni.
2. Menemukan faktor-faktor pendukung dan penghambat keterlibatan peran institusi pasangan dalam implementasi pendidikan sistem ganda.

H. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan prinsip-prinsip yang terkait dengan prosedur implementasi pendidikan sistem ganda dalam

mewujudkan lulusan yang trampil, mampu beradaptasi dengan dunia kerja yang berdampak pada daya serap lulusan SMK secara optimal. Hasil temuan juga diharapkan memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan pengelola pendidikan sistem ganda dalam memaksimalkan kegiatan. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap upaya peningkatan pendidikan khususnya pada penyelenggaraan pendidikan sistem ganda.

2. Secara Praktis

Setelah penelitian ini selesai, diharapkan dapat memberikan sumbangan konkrit berupa :

- a) Masukan bagi guru dalam menerapkan konsep pendidikan sistem ganda yang bersesuaian dengan bidang tugasnya masing-masing.
- b) Masukan bagi kepala sekolah, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pembinaan dan menetapkan suatu kebijakan dalam rangka mengoptimalkan pendidikan sistem ganda.
- c) Masukan bagi dinas pendidikan untuk menentukan kebijakan pendidikan sistem ganda di wilayah kerjanya.
- d) Sebagai bahan rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan sistem ganda.